

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi saat ini telah berubah wajah sebagai dampak dari inovasi dan perkembangan teknologi, maka dari itu *landskap* kehidupan demokrasi telah bertransformasi secara digital, dan fenomena tersebut dapat diistilahkan dan juga dipertukarkan sebagai disrupsi demokrasi, demokrasi digital, atau demokrasi virtual. Sedangkan titik awal munculnya istilah demokrasi digital terjadi pada tahun 1994, yang dimulai oleh Steven Clift ketika melanjutkan arsip dari Minnesota *e-democracy project* dalam laman: *e-democracy.org*, Clift memanfaatkan teknologi internet untuk membangun situs tersebut dalam rangka menciptakan ruang publik demokrasi secara digital dengan membagikan informasi politik lokal kepada warga Minnesota, Amerika Serikat, hal itu dimaksudkan Clift untuk meningkatkan partisipasi atau keterlibatan warga dalam kebijakan di tingkat negara bagian (Ambardi, 2021)

Kemunculan demokrasi digital membawa konsekuensi fenomenologis dalam praktik kehidupan berpolitik dan berdemokrasi, yang secara empiris berdampak pada munculnya dua fenomena: *Pertama*, modernisasi teknologi yang berbanding lurus dengan kemunculan *platform* digital (website, media *online* dan media sosial). *Kedua*, modernisasi

dan ketersediaan teknologi media telah membawa budaya peningkatan partisipasi politik. Partisipasi warga negara dalam era demokrasi digital telah berubah menuju format digital, teknologi internet dan platform digital yang memiliki karakter yang cepat dan interaktif, membuat relasi simultan antara demokrasi dan partisipasi menjadi semakin integral, terutama secara teknokratik demokrasi digital sangat mendukung untuk keaktifan partisipasi politik, partisipasi kebijakan, dan partisipasi sosial (Andriadi, 2017)

Menguatnya partisipasi warga negara dalam format digital tentunya juga tidak terlepas dari terbentuknya ruang publik digital, dua hal tersebut (partisipasi dan ruang publik digital) merupakan relasi integral dari tema besar demokrasi digital (Loader & Mercea, 2011). Memaknai hal itu dalam konteks kemunculan demokrasi digital dan partisipasi digital di Indonesia, Wasisto (2017) menjelaskan sejak tahun 2014 telah muncul partisipasi oleh warga negara secara digital, hal ini ditandai dengan kehadiran ekspresi politik kelas menengah dan kaum akar rumput melalui media sosial, yang selanjutnya oleh Wasisto disebut sebagai ekspresi politik *netizen* Indonesia, Apa yang dijelaskan oleh Wasisto mengenai ekspresi politik *netizen* Indonesia adalah gambaran empiris awal tentang demokrasi digital di Indonesia (Jati, 2017)

Memaknai bahwa demokrasi digital merupakan suatu kemajuan dari gaya demokrasi lama, penting untuk merujuk

kajian Moore (1996) yang membagi tiga kelas dalam aktivitas demokrasi, yakni: kelas feodal, kelas petani, dan kelas borjuis kota, yang dengan ketiganya mempengaruhi format demokrasi yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit, gambaran sosiologis dari demokrasi yang sebagaimana dijelaskan Moore membutuhkan modal sosial dan biaya yang tinggi untuk ikut berperan dalam kontestasi politik dan demokrasi (Moore, 1996). Sehingga jika diperbandingkan melalui perspektif akses terhadap demokrasi secara luas, demokrasi digital menjadi jawaban dengan adanya transformasi dari gaya lama menuju format digital.

Dalam konteks demokrasi digital tentu wajar jika menempatkan media sosial sebagai pilar demokrasi karena potensinya dalam membangun kehidupan yang demokratis (Rodny-Gumede et al., 2017). Hal ini adalah momentum partisipasi, selain itu media sosial dalam konteks sebagai alat partisipasi politik sejalan dengan asas demokrasi seperti: kesetaraan, kebebasan, partisipasi dan perlindungan hak asasi manusia (Simarmata, 2014). Efektivitas media sosial untuk partisipasi dalam demokrasi secara teknis tercermin dalam ciri media sosial yang interaktif dan menciptakan komunikasi dua arah, sehingga berpotensi besar untuk menciptakan dialektika atau menyuarakan opini dan aspirasi dalam satu ruang publik digital (McQuail, 1987)

Demokrasi digital yang mensyaratkan adanya teknologi internet dan *platform* digital, telah menjadikan pola kehidupan warga negara yang lebih demokratis. Kemunculan aktivisme digital menjadi salah satu fenomena sosial atas itu. Gelombang aktivisme digital juga dapat dimaknai sebagai komunitas, gerakan sosial, atau populisme yang memanfaatkan teknologi media sosial untuk menyuarakan aspirasi politik. Bagi pelaku aktivisme digital media sosial menjadi alat dan mempunyai representasi identitas, ide warga negara. Aktivisme digital juga merupakan bagian dari dampak sosial adanya perkembangan teknologi internet dan demokrasi digital, namun di satu sisi penting untuk memandang bahwa aktivisme digital adalah proses dialektika atau interaksi organik antara teknologi, warga negara (Lim, 2012)

Fenomena empiris kemunculan aktivisme digital terjadi di kabupaten Purworejo, khususnya di desa Wadas, kecamatan Bener. Warga desa Wadas secara kolektif membentuk aliansi gerakan sosial bernama: GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas). Dalam konteks sosiologis, kemunculan Gempadewa terjadi ketika proyek strategis nasional (PSN) pembangunan bendungan Bener mulai berjalan, dan dalam proses pembuatan bendungan tersebut, desa Wadas menjadi kawasan yang dijadikan untuk lokasi pertambangan material batu andesit, yang digunakan untuk kebutuhan pembangunan bendungan bener. Dasar

penetapan lokasi pertambangan di desa Wadas, adalah sesuai dengan IPL atau izin penetapan lokasi, yang secara administratif dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Farisa, 2022)

Sebagaimana gerakan sosial, Gempadewa memiliki isu publik dan tujuan yang disuarakan, yaitu penolakan dan pemberhentian penambangan di kawasan desa Wadas. Menurut mereka, penambangan tersebut akan mengancam kelestarian alam atau lingkungan di desa Wadas, yang artinya, warga desa wadas atau Gempadewa sadar akan potensi bencana lingkungan, yang secara historis pernah terjadi di desa tersebut dalam dua dekade yang lalu. Selain memiliki isu publik yang diangkat, Gempadewa secara organisatoris juga mempunyai strategi aksi, seperti ciri ciri gerakan sosial pada umumnya. Pengorganisiran masa, advokasi dan aksi massa menjadi bagian dari proses gerakan mereka, dan yang menarik dari gerakan Gempadewa adalah strategi mereka melakukan aktivisme secara digital, menghimpun kekuatan melalui media sosial Twitter dengan nama akun: @Wadas_Melawan. Dan memasifkan isu dengan gerakan tagar #SaveWadas #WadasMelawan #WadasTolakTambang dan #CabutIPLWadas (Asih, 2020)

Pada penelusuran awal penulis, akun @Wadas_Melawan telah terverifikasi resmi oleh Twitter dan telah mendapatkan simbol centang biru, artinya akun tersebut bukanlah akun palsu

melainkan resmi dengan identitas pengguna dan pengikut yang jelas. Dan dalam beberapa momentum melalui tiga tagar di atas, akun @Wadas_Melawan berhasil membentuk opini publik dengan menciptakan tren percakapan atau trending topik di lini maya Twitter Indonesia. Berkaitan dengan itu, Ismail Fahmi (2022) mengeksplorasi mengenai tagar #WadasMelawan melalui perangkat analisis Media Drone Emprit, menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, tagar tersebut menjadi tren percakapan di lini masa Twitter dengan catatan angka 17.000 *mention* per jam, yang merepresentasikan tagar tersebut (Fahmi,2022)

Seperti penjelasan awal di atas, bahwa aktivisme digital adalah konsekuensi empiris dari demokrasi digital, maka penelitian ini akan menganalisis tentang apa motif politik yang melatarbelakangi kemunculan dan aktivisme kelompok Gempadewa, upaya melihat motif politik adalah bagian dari menguji keautentikan gerakan sosial (Gempadewa) hal ini penting untuk penegasan bahwa gerakan tersebut murni sebagai perlawanan yang organik, kendatipun gerakan dilakukan secara digital. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peta jejaring digital akun @Wadas_Melawan, analisis tersebut meliputi: tema pesan dalam *tweet*, identitas aktor atau pendengung, kategorisasi tagar yang digunakan beserta isi konten, dan pilihan kata yang sering digunakan dalam *tweet*.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa motif politik yang melatarbelakangi aliansi Gempadewa ?
2. Bagaimana peta sosial network analisis (SNA) Gempadewa melalui akun Twitter @Wadas_Melawan, yang meliputi: tema pesan dalam Tweet, identitas aktor atau pendengung, kategorisasi tagar yang digunakan beserta isi konten, dan pilihan kata yang sering digunakan dalam Tweet ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik demokrasi digital secara empiris khususnya dalam fenomena aktivisme digital Gempadewa, dengan mengeksplorasi secara ilmiah dan metodologis mengenai motif yang melatarbelakangi kemunculan gerakan Gempadewa, selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peta sosial network analisis atau peta jejaring digital Gempadewa melalui akun @Wadas_Melawan. Berdasarkan itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi di lingkup politik dan pemerintahan untuk memahami fenomena dan perkembangan demokrasi digital dan aktivisme digital di Indonesia.